

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arba, HM dan Diman Ade Maulada, 2020, *Hukum Hak Tanggungan Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- HS., Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persana, Jakarta.
- Khairulnas dan Leny Agustian., 2018, *Panduan Notaris/ PPAT dalam Menghadapi Gugatan Perdata*, UII Press, Yogyakarta.
- Khoidin, M., 2017, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Kosasih, Johanes Ibrahim, dan Hasan Haykal., 2021, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamongan, Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten, 2020, *Tanya Jawab Tentang Hak Tanggungan Elektronik*, CV. Mazda Media, Malang.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Susanti, Dyah Octorina, dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Utomo, Laksanto, 2020, *Buku Ajar Hukum Agraria dan Property*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal

- Abdurahman, "Perkembangan Hak-Hak Jaminan Atas Tanah", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 2, Vol. 9, Universitas Indonesia, 2011.
- Sasauw, Christian, "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, No. 1, Vol. 3, Universitas Sam Ratulangi, 2015.

Nurwulan, Pandam, “Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1, Vol. 28, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Wiguna, I Wayan Jody Bagus, “Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, No. 01, Vol. 5, Universitas Udayana, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 349.

D. Tesis

D., Jessica Christabel, “Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Ektronik Pada Kantor Pertanahan Di Kabupaten Mempawah”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, 2021.

Muhammad, S. K., “Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Notaris/ PPAT Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 35/ Pid.B/ 2022/ Pn.Tpg)”, *Tesis*, Fakultas Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang, 2022.

Nasution, D. K., “Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Yang Dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Deli Serdang)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

E. Website

Philipus Sitepu, “Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/>, diakses pada 9 Juli 2023 pukul 19.42 WIB